

PENGARUH IMPLEMENTASI SIMDA, KUALITAS SDM, PENERAPAN SAP DAN DUKUNGAN MANAJEMEN PUNCAK TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMDA

Khurriyatul Fu'adah¹, Nafi' Nayati Zahro², Retno Tri Handayani³

Program Studi Akuntansi, Universitas Muria Kudus¹²³

khurriyatul8@gmail.com¹, nafi'.inayati@umk.ac.id², retno.tri@umk.ac.id³

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of the implementation of regional management information systems (SIMDA), the quality of human resources, the implementation of government accounting standards, and top management support on the quality of regional government financial reports. This research was conducted at the OPD in Demak Regency using a purposive sampling method, involving 120 respondents. This research uses primary data by distributing questionnaires. The data analysis method in this research uses multiple linear regression analysis. The results of this research show that the implementation of the regional management information system (SIMDA), the quality of human resources, and the implementation of government accounting standards have no effect on the quality of local government financial reports, while top management support has a positive effect on the quality of local government financial reports.

Keywords: *Implementation of Regional Management Information Systems (SIMDA), Quality of Human Resources, Implementation of Government Accounting Standards, Top Management Support, Quality of Regional Government Financial Reports..*

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara yang dipercayakan kepada pemerintah pusat dan daerah merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas. Untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyusunan laporan keuangan harus mengacu pada standar akuntansi pemerintah (SAP) dan disampaikan dengan tepat waktu. Faktanya, di Indonesia masih terdapat masyarakat dengan kualitas data akuntansi yang kurang baik. Hal ini dibuktikan berdasarkan laporan audit IHPS I tahun 2021 bahwa 541 (99%) dari 541 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2020. Terdapat satu pemerintah daerah yang belum menyerahkan laporan keuangan kepada BPK (badan pemeriksa keuangan), yaitu pemerintah kabupaten Waropen, Papua. Terhadap 541 LKPD tahun 2018 tersebut BPK menerbitkan 486 (90%) opini wajar tanpa pengecualian (WTP), 49 (9%) opini wajar dengan pengecualian (WDP), 4 (0,7%) opini tidak menyatakan pendapat (TMP), dan 2 (0,3%) opini tidak wajar (TW) (sumber: <https://jateng.bpk.go.id/ihktisar-hasil-pemeriksaan-semester-ihps/>).

Dari hasil pemeriksaan audit BPK terhadap LKPD kabupaten Demak untuk jangka waktu 6

tahun dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Demak

Tahun	Opini BPK
2016	Wajar Dengan Pengecualian
2017	Wajar Tanpa Pengecualian
2018	Wajar Tanpa Pengecualian
2019	Wajar Tanpa Pengecualian
2020	Wajar Tanpa Pengecualian
2021	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: <https://jateng.bpk.go.id/lhp-lkpd/>

Meski pernyataan BPK adalah WTP masih terdapat catatan terhadap LKPD kabupaten Demak mengenai ketaatan terhadap peraturan hukum dan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), terkait SPI catatan yang ditemukan antara lain meliputi belum tertatanya barang milik daerah (sumber: suara merdeka). Kurangnya apresiasi pemerintah terhadap sumber daya manusia juga dirasa oleh karyawan pada beberapa organisasi pemerintah daerah (OPD) di Kabupaten Demak. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Demak menyatakan bahwa menjaga laporan keuangan yang berkualitas tinggi memerlukan evaluasi berkala terhadap kelemahan yang masih ada.

Dalam era kemajuan teknologi informasi dan tuntutan akan akuntabilitas yang semakin meningkat, pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi esensi utama dalam mencapai transparansi, efisiensi, dan efektifitas dalam penggunaan anggaran publik. Sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) telah menjadi salah satu instrumen yang krusial dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Namun informasi SIMDA saja tidak cukup untuk memastikan kualitas pelaporan keuangan yang memadai. Pemerintah daerah harus menerapkan sistem aplikasi untuk pelaporan keuangan untuk menerapkan manajemen keuangan daerah yang cepat, akurat dan tepat. Fokus implementasi berada pada perilaku, kegiatan, atau mekanisme sistem. Implementasi lebih dari sekedar kegaitans, akan tetapi juga merupakan aktivitas yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan.

Kualitas sumber daya manusia dalam lingkungan pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan keuangan yang baik dan laporan keuangan yang akurat. Sebuah perusahaan memiliki nilai yang baik karena kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan sumber daya manusianya. Keberhasilan suatu perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia, hal ini menjadi tolak ukur entis dalam menghasilkan laporan kuangan (Ihsanti, 2014).

Selain itu penerapan standar akuntansi pemerintah yang sesuai dapat membantu dalam menyajikan informasi keuangan yang relevan dan komprehensif. Secara umum standar akuntansi merupakan acuan yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan kepada pihak selain entitas yang memegang otoritas tertinggi. PP No. 24 Tahun 2005 dirubah pemerintah menjadi PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Untuk mencapai pengukuran kinerja yang baik, pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggungjawab, penting untuk

menerapkan penggunaan basis akrual.

Dukungan dari manajemen puncak dan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas juga menjadi faktor penentu dalam memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Manajemen merupakan pemimpin yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi, menentukan garis tindakan dan mengarahkan interaksi organisasi dengan lingkungan. Adanya tanggung jawab otoritatif mengikuti konsistensi dalam mengadopsi laporan keuangan yang andal menurut standar pemerintah.

TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori keagenan

Hubungan antara rakyat (prinsipal) dan pemerintah (agen) dijelaskan dalam teori keagenan. Pemerintah (agen) bertindak sebagai komitmen pihak pemegang amanah yang berwenang dalam proses penyajian, pelaporan, tanggung jawab dan mengungkapkan segala macam gerak dan pelaksana pertanggungjawaban kepada rakyat (prinsipal) sebagai pemberi amanah yang memiliki keistimewaan dalam hal untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pada prakteknya dalam teori keagenan terjadi konflik kepentingan karena pemerintah dan rakyat memiliki kepentingan yang berbeda. Penting untuk mengawasi apa yang dilakukan agen atas nama prinsipal untuk mengurangi konflik. Salah satu instrumen untuk mengurangi adanya agency cost adalah dengan dilakukannya pemeriksaan pada laporan.

Kualitas Laporan Keuangan

Dalam proses untuk menghasilkan laporan keuangan informasi yang dipublikasi harus relevan untuk membantu pengguna akhir dalam pengambilan keputusan. Mahmudi (2011) menyatakan suatu sistem akuntansi menghasilkan laporan keuangan untuk menyediakan informasi keuangan, selanjutnya digunakan menjadi dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan harus didasarkan pada SAP berlaku dan bermanfaat bagi *stakeholders* dalam membuat penentuan kepuasan. Dari pengertian diatas maka laporan keuangan adalah dokumen yang berisi catatan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan untuk periode akuntansi tertentu.

Kualitas merupakan kepatuhan terhadap standar yang diukur menggunakan tingkat kesesuaian dan diperoleh melalui inspeksi (Susilawati dan Riana 2014). Artinya untuk pengambilan keputusan, pihak yang berkepentingan dapat memanfaatkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan adanya komitmen untuk bertanggung jawab atas laporan keuangan yang dihasilkan, yang mempengaruhi pendapat tentang keakuratan informasi keuangan yang disajikan. Akuntabilitas menjadi pengaruh utama dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas (Evicahyani & Setiawina, 2016).

Implementasi Sistem Manajemen Daerah

Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk memproses, mengolah, menerima, mengumpulkan dan menyimpannya data dengan tujuan menghasilkan informasi yang relevan. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik (Khomsiyah & Indriantoro, 2000). SIMDA merupakan sistem tersendiri yang berbasis teknologi informasi keuangan (Simanjuntak, 2019). SIMDA merupakan *software system* yang digunakan untuk mengolah data keuangan daerah dengan tujuan untuk hasil informasi LKPD yang relevan, lengkap, akurat dan dapat diverifikasi oleh pengguna. Cara organisasi menjalankan system informasinya, kemudahan bagi penggunanya, dan seberapa baik pemanfaatan pengguna teknologi semuanya berkontribusi pada keberhasilannya. Pengaruh SIMDA terhadap laporan keuangan diantaranya memudahkan pengelolaan data, meningkatkan transparansi, mempermudah pengawasan, dan menyediakan informasi yang lebih lengkap.

H_1 : Implementasi sistem informasi manajemen daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah komponen utama, maka harus dikendalikan dengan baik untuk memastikan bahwa hal tersebut dapat memberikan kontribusi terbaik bagi pencapaian tujuan entitas. Dalam menghadapi kebutuhan yang meningkat untuk membantu entitas mencapai tujuan mereka, peran sumber daya manusia semakin penting. Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen yang ada dalam entitas dan berperan dalam mencapai keberhasilan organisasi. Sumber daya manusia tanpa kualifikasi tidak dapat melaksanakan tanggungjawab secara efektif dan efisien. Artinya, tanggungjawab yang diselesaikan tidak akan dikirimkan tepat waktu, yang akan membuang waktu dan tenaga. Dimilikinya SDM yang berkualitas dan unggul, maka dalam proses penyusunan laporan keuangan tidak akan memakan waktu. Seorang pegawai pemerintah atau pegawai negeri adalah sumber daya manusia yang dipertanyakan.

Ketika aparatur pemerintah memiliki kualifikasi dan kompetensi, mereka dapat membantu pemerintah menerapkan disiplin waktu dan tata kelola yang baik. Sumber daya yang berkualitas tinggi menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang sama dengan informasi akuntansi yang ada. Dibutuhkan seseorang yang kompeten, yaitu yang memiliki wawasan, kemampuan dan keterampilan guna proses penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan harus memenuhi standar pemerintah dengan tujuan mudah dipahami dan tidak menyesatkan bagi pembaca (Zahro, 2015).

H_2 : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi pemerintah (SAP) adalah aturan pembukuan yang diimplementasikan

untuk memperkenalkan laporan keuangan pemerintah (Runtuwene et al., 2017). Sistem akuntansi adalah alat yang digunakan untuk menyusun LKPD, dan standar akuntansi adalah prinsip yang menentukan pembuatan laporan keuangan harus disajikan (Napitupulu, 2021). Standar akuntansi mengatur tentang pencatatan, pengakuan, pengukuran dan pelaporan.

Untuk penyusunan laporan di Indonesia, SAP merupakan perjanjian hukum (Runtuwene et al., 2017). Dapat disimpulkan SAP adalah seperangkat prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa anggaran dan tujuan dilaksanakan sesuai rencana dan kesesuaian dengan penggunaannya dapat ditetapkan, dikelola, dan dipantau terhadap kepatuhan penggunaan data. Tujuan penyajian pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang situasi keuangan entitas pelapor selama satu periode pelaporan. Jadi bisa dikatakan bahwa dengan asumsi jika penyajian dibuat sesuai standar yang berlaku, maka laporan keuangan seharusnya tidak memiliki kesalahan yang dapat menipu klien atau pembaca laporan keuangan pemerintah (Fuad et al., 2023).

H₃: Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Dukungan Manajemen Puncak

Untuk dapat mengukur keberhasilan dan mencapai tujuannya, setiap organisasi membutuhkan dukungan manajemen puncak. Manajemen puncak bertugas mengarahkan operasi perusahaan dan merencanakan aktivitas dan strategi perusahaan secara keseluruhan. Dukungan untuk pengguna sistem yang disediakan oleh manajemen puncak dikenal sebagai dukungan manajemen puncak. Manajemen dapat memberikan dukungan fasilitas berupa instruksi dan dukungan untuk pengguna sistem yang mengalami masalah dengan sistem. Mendapatkan dukungan penuh dari manajemen puncak adalah langkah terpenting dalam perencanaan sistem (Wilkinson, 2009).

Terdapat tiga cara untuk mengetahui jenis dukungan apa yang diberikan manajemen puncak. Pertama adalah memberi penghargaan kepada karyawan yang berkinerja baik dengan penghargaan, sertifikat, atau pengakuan lainnya. Kedua, menyediakan fasilitas untuk memastikan tugas berjalan lancar. Hal ini bertujuan agar karyawan merasa nyaman dan mendorong mereka untuk semangat dalam bekerja. Ketiga, salah satu metode bantuan manajemen kepada karyawan dalam meningkatkan kualitas pekerjaan mereka adalah dengan memberikan pengawasan dan arahan kepada setiap karyawan.

H₄: Dukungan manajemen puncak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode survey yang nantinya peneliti memberikan daftar pertanyaan kepada responden. Penelitian ini digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di Kabupaten Demak. Faktor-faktor yang digunakan untuk menguji penelitian ini adalah

empat elemen utama, yaitu implementasi sistem informasi manajemen daerah, kualitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan dukungan manajemen puncak. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu peneliti memilih partisipan secara acak berdasarkan keunikan karakteristik pengalaman, sikap dan persepsi mereka.

Sampel dalam penelitian ini adalah 4 orang pegawai yakni kepala bidang, kepala sub bagian, dan 2 orang staf bagian keuangan/akuntansi pada 30 OPD yang ada di Kabupaten Demak. Penjelasan mengenai distribusi kuesioner dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2
Distribusi Kuesioner

No.	Keterangan	Jumlah	Presentase
1.	Kuesioner disebar	120	100%
2.	Kuesioner tidak kembali	3	2,5%
3.	Kuesioner tidak dapat diolah	19	15,8%
4.	Kuesioner yang dapat digunakan	98	81,7%

Sumber: Olah data primer tahun 2023

Pada Tabel 1 mengenai distribusi sampel, terlihat bahwa 120 kuesioner telah didistribusikan dan terdapat total 19 kuesioner tidak dapat diolah yang disebabkan tidak memenuhi kriteria penelitian. Oleh karena itu, tingkat respons yang diperoleh dalam penelitian ini hanya 81,7%. Proses distribusi kuesioner dilakukan dengan bertemu langsung dengan calon responden di perangkat daerah tempat mereka bekerja. Periode distribusi sampel berlangsung kurang lebih 2 minggu.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataprimer yang diperoleh langsung dari respondendengan mendistribusikan kuesioner ke lapangan. Kuesioner dalam penelitian ini berbentuk pengembangan indikator untuk masing-masing variabel, yaitu:

Tabel 3
Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Sumber	Skala
Kualitas Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koreksi informasi masa lalu 2. Prediksi informasi masa depan 3. Ketepatan 4. Jelas dan akurat 5. Wajar sesuai transaksi 6. Andal 7. Dapat dibandingkan dari waktu ke waktu 8. Jelas dan informatif 9. Dapat dibandingkan dengan entitas lain 10. Kepatuhan terhadap SAP 	(Abidin et al., 2018)	Likert 1-5

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat berbasis kinerja 2. Kegunaan alat 3. Penyebaran basis data 4. Menerapkan manajemen data 	(Abidin et al., 2018)	Likert 1-5
Kualitas Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan 2. Kontak dan pelatihan 3. Tepat waktu dan efisien 4. Memahami struktur organisasi 5. Komitmen 	(Abidin et al., 2018)	Likert 1-5
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aset 2. Pencatatan modal 3. Kewajiban 4. Pemisahan fungsi dan tugas 5. Manajemen keuangan 6. Pendidikan 7. Sarana dan prasarana 	(Abidin et al., 2018)	Likert 1-5
Dukungan Manajemen Puncak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambisi 2. Kontribusi 3. kepedulian 	(Hidayakh et al., 2020)	Likert 1-5

Sumber: Olah data primer tahun 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa baik model regresi dapat menjelaskan variasi dalam data. Berikut ini adalah hasil dari uji koefisien determinasi yang ditemukan dalam tabel:

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,354 ^a	0,125	0,088	3,29609

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3
b. Dependent Variable: Y

Sumber: Olah data primer tahun 2023

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel menunjukkan bahwa nilai adjusted R-squared sebesar 8,8%. Ini berarti bahwa sekitar 8,8% variasi dalam variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel implemetasi SIMDA, kualitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan dukungan manajemen puncak yang termasuk dalam model regresi peneletian ini. Sisanya, sekitar 91,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimaksudkan dalam model regresi.

Uji Signifikan (Uji-F)

Uji signifikan adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam analisis regresi memberikan hasil signifikan secara statistik atau tidak. Berikut ini adalah hasil dari uji signifikan yang ditemukan dalam tabel:

Tabel 5
Hasil Uji-F

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	144,977	4	36,244	3,336	0,013 ^b
	Residual	1010,369	93	10,864		
	Total	1155,347	97			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3

Sumber: Olah data primer tahun 2023

Hasil uji signikan pada tabel menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah 0,013 yang lebih kecil dari tingkat kepercayaan yang ditetapkan sebesar 0,05. Dengan demikian, berdasarkan uji-F dapat disimpulkan bahwa variabel implemetasi SIMDA, kualitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan dukungan manajemen puncak bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Uji Hipotesis (Uji-t)

Uji-t adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji signifikansi individual dari masing-masing koefisien regresi dalam analisis regresi. Uji-t membantu untuk menentukan apakah setiap variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. Berikut ini adalah hasil dari uji-t yang ditemukan dalam table:

Tabel 6
Hasil Uji-t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	28,073	5,136		5,466	,000
X1	,341	,174	,198	1,953	,054
X2	,102	,123	,087	,833	,407
X3	-,015	,157	-,011	-,095	,925
X4	,577	,278	,228	2,077	,041

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Olah data primer tahun 2023

a. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji-t pada tabel menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} 1,953 < t_{tabel} 1,98580 dengan nilai signifikansi 0,054. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak, yang disebabkan oleh nilai signifikansi yang lebih dari 0,05. Maka, variabel implementasi sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji-t pada tabel menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} 0,833 < t_{tabel} 1,98580 dengan nilai signifikansi 0,407. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak, yang disebabkan oleh nilai signifikansi yang lebih dari 0,05. Maka, variabel kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

c. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji-t pada tabel menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} -0,095 < t_{tabel} 1,98580 dengan nilai signifikansi 0,925. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak, yang disebabkan oleh nilai signifikansi yang lebih dari 0,05. Maka, variabel penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

d. Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji-t pada tabel menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} 2,077 < t_{tabel} 1,98580 dengan nilai signifikansi 0,041. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima, yang disebabkan oleh nilai signifikansi yang kurang dari 0,05. Maka, variabel dukungan manajemen puncak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Pembahasan**Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Meskipun SIMDA dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan daerah, namun dalam praktiknya terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kendala tersebut meliputi kekurangan pelatihan dan pemahaman pengguna, kegagalan sistem, dan kurangnya integrasi antara SIMDA dan sistem lainnya.

Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tingkat keahlian dan pemahaman yang rendah dari staf keuangan pemerintah daerah dapat menghambat penyusunan dan pelaporan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi. Kekurangan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih dapat mempengaruhi akurasi, keberlanjutan, dan transparansi laporan keuangan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Meskipun penerapan standar akuntansi pemerintah seharusnya memastikan konsistensi dan akurasi laporan keuangan, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam menerapkan standar tersebut dengan baik. Beberapa tantangan tersebut meliputi kurangnya pemahaman dan kesadaran akan standar akuntansi, kelemahan dalam proses pemantauan dan pengawasan, serta ketidakkonsistenan dalam penerapan standar diberbagai OPD.

Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Dukungan manajemen puncak dianggap sebagai mekanisme kontrol yang efektif untuk mengurangi konflik keagenan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Data statistik yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa variabel dukungan manajemen puncak memperoleh nilai t hitung $2,077 < t$ tabel $1,98580$ dengan nilai signifikansi $0,041$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima, yang disebabkan oleh nilai signifikansi yang kurang dari $0,05$. Dengan adanya dukungan manajemen puncak, OPD Kabupaten Demak mampu menyediakan sumber daya yang memadai, mengimplementasikan standar akuntansi dengan konsisten, menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan dan reputasi dalam pelaporan keuangan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan:

- a. Penelitian ini menggunakan metode survai dengan penyebaran kuesioner secara langsung pada setiap masing-masing OPD sebagai metode pengumpulan data. Namun, dalam proses penelitian, beberapa OPD meminta agar kuesioner ditinggalkan. Hal ini dapat berpotensi memengaruhi objektivitas respons dari responden dalam menjawab pernyataan.
- b. Meskipun langkah-langkah pengambilan sampel yang cermat telah diikuti, jumlah sampel yang terbatas dapat mempengaruhi representativitas temuan. Penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar dapat memberikan hasil yang lebih reliabel.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan studi longitudinal yang melibatkan pengumpulan data dari beberapa periode waktu. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak implementasi kebijakan, perubahan manajemen atau faktor eksternal lainnya terhadap kualitas laporan keuangan.
- b. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan melakukan perbandingan antara pemerintah daerah lain. Perbandingan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diberbagai konteks dan karakteristik daerah.
- c. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK Jateng. (2021). *Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester IHPS*. Bpk Jateng.
- BPKP Jateng. (2021). *No Title*. BPK RI.
- Cahya, C. (2022). *11 Kabupaten/Kota di Jateng Terima LHP atas LKPD dari BPK Jateng, Semuanya WTP*. Suara Merdeka.
- Deddy Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi kedua). Salemba Empat.
- Evicahyani, S. I., & Setiawina, N. D. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(3), 403–428.
- Fuad, K., Nadzri, F. a a, Urus, S. T., & Handayani, R. T. (2023). Measuring the Competence and Morality of Village Apparatuses in Minimising the Occurrence of Fraud in Village Fund *International Journal of ...*, 349–361. <https://doi.org/10.55573/IJAFB.084625>
- Hendri, M., & NR, E. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2479–2493. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.224>
- Hidayakh, E., Rahayu, S., & Gowon, M. (2020). Determinan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 5(2), 80–89. <https://doi.org/10.22437/jaku.v5i2.10258>
- Indra Bastian. (2010). *Laporan Keuangan Pemerintahan*. Salemba Empat.
- Istri, C., Prami, A., Made, N., & Erawati, A. (2017). Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Sistem Informasi, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi Pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 2017(1), 1186–1205.
- Khoirul Abidin, Affifudin, dan J. (2018). E-JRA Vol. 07 No. 01 Agustus 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. *E-JRA Vol. 07 No. 01 Agustus 2018*, 07(01), 32–45.
- Khomsiyah, K., dan Indriantoro, N. U. R. (2000). Metodologi Penelitian Akuntansi Keperilakuan: Pendekatan Filsafat Ilmu. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 89–102.
- Kurniawan. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Aksesibilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Demak). *Digilibumk*.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Pres.
- Napitupulu, E. A. S. (2021). *Tinjauan Atas Kesiapan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (PP No. 71 Tahun 2010)*.
- Nendher, J. C. T., Manossoh, H., Afandi, D., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Ratulangi, U. S., & Bahu, J. K. (2022). *Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No . 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Evaluation of The Implementation of Government Accounting Standards No . 02 Concerning The . 6(1)*, 449–460.
- Runtuwene, C., Saerang, D. P. E., & Morasa, J. (2017). Pengaruh Penerapan SIMDA, SAP, Motivasi Pegawai dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 299–307. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.18452>
- Simanjuntak, T. P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karo. *Jurnal*

Neraca Agung Volume, 18.

- Sinta Puspitaningrum, M. (2021). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Dukungan Manajemen Pucak Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Pesquisa Veterinaria Brasileira, 26(2)*, 173–180.
- Susilawati, D. S. R., & Riana, D. S. (2014). Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal STAR. XI (1)*, 15–32.
- Virsia Fani Prasitha Devi. (2013). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah (Penelitian PD SKPD di Lingkungan Pem. Daerah Kabupaten Kulonprogo). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Wilkinson. (2009). *Sistem Informasi dan Informasi* (M. Sinaga (ed.); Edisi Kedu). Erlangga.
- Zahro, N. I. (2015). Kompetensi Sumberdaya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers UNISBANK (SENDI_U) Kajian Multi Disiplin Ilmu Untuk Mewujudkan Poros Maritim Dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat*, 978–979.